

**PERJALANAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA
TAHUN 1973-1984
Keluarnya Nahdlatul Ulama dari Partai Persatuan Pembangunan**

MUHAMMAD EKO SUBAGTIO

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-mail : eko25official@gmail.com

Sumarno

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

Perjalanan sejarah NU sekitar tahun 1973-1984 sangat menarik untuk dikaji, sebab pada saat tersebut NU berusaha keluar dari kemelut konflik yang disebabkan oleh hegemoni dan korporasi pemerintah. Masalah mulai muncul ketika tahun 1973 pemerintah menerapkan korporatisme partai, yaitu menggabungkan partai menjadi satu berdasarkan ideologinya. Tindakan tersebut sangat merugikan NU yang pada pemilu 1971 menjadi partai pemenang ke dua setelah Golkar. Kebijakan fusi membuat kiprah politik NU menjadi semakin terbatas dan eksistensinya secara otomatis terenggut oleh PPP.

Dari peristiwa tersebut akhirnya muncul masalah-masalah baru yang melanda NU maupun PPP. Terkait dengan hal itu maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana sejarah keterlibatan NU di dunia politik?, 2). Bagaimana pemerintah Orde Baru melakukan hegemoni terhadap PPP dan NU? Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari *heuristic*, kritik, interpretasi, dan *historiografi*. Adapun sumber utama yang digunakan adalah dokumen putusan Munas Alim Ulama Situbondo tahun 1973 dan Laporan Mukhtamar ke-27 Situbondo tahun 1984.

Berdasarkan penemuan hasil analisis data, dapat dinyatakan bahwa konflik yang mengiringi perkembangan NU dan PPP pada tahun 1973-1984 muncul akibat hegemoni dan korporasi pemerintah, korporasi tersebut berupa pemaksaan fusi terhadap sembilan partai politik yang disederhanakan berdasarkan ideologinya menjadi dua saja. Sedangkan hegemoni pemerintah adalah upaya pengkerdilan partai politik melalui beberapa kebijakan. Beberapa diantaranya yaitu kebijakan fusi partai, ikut campurnya pemerintah dalam urusan internal partai (terutama suksesi kepemimpinan), pemaksaan RUU melalui parlemen meliputi RUU Perkawinan, RUU Parpol dan Golkar, RUU Pemilu, pembahasan aliran kepercayaan dan pelembaan P4 (meskipun ada beberapa pasal yang berhasil digagalkan oleh NU) serta kebijakan asas tunggal. Pada saat Mukhtamar Situbondo tersebut selain membahas tentang penerimaan Pancasila juga menyatakan sikap keluar dari PPP (bahkan politik praktis) setelah mengalami beberapa kali marjinalisasi politik dan puncaknya adalah ketika merasa dicurangi dalam penetapan DCS (Daftar Calon Sementara) oleh Naro.

Kata Kunci : Politik, NU, PPP

ABSTRACT

The history of NU around 1973-1984 was very interesting to study, because at that time NU was trying to get out of the conflict that was caused by government hegemony and corporation. Problems began to emerge when in 1973 the government adopted party corporatism, namely combining parties into one based on their ideology. This action was very detrimental to NU, which in the 1971 election became the second winner after Golkar. Fusion policy made NU's political progress become more limited and its existence was automatically taken away by PPP.

From these events finally new problems emerged which hit NU and PPP. Related to this, the authors formulated the problem as follows: 1) What is the history of NU's involvement in the world of politics and corporatism carried out by the government? 2). How can the government do hegemony against PPP and NU? The method used in this study uses a historical research method consisting of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The main source used is the document of the 1973 Alim Ulama National Conference's decision and the 27th Conference of Situbondo in 1984.

Based on the findings of data analysis, it can be stated that the conflict that accompanied the development of NU and PPP in 1973-1984 arose due to government hegemony and corporation, in the form of coercive fusion of nine simplified political parties based on their ideology into two. While the government hegemony is the effort to reduce political parties through several policies. Some of them are party fusion policies, government interference in internal party affairs

(especially leadership succession), coercion of the bill through parliament covering the Marriage Bill, Political and Golkar Bill, Election Bill, discussion of the belief flow and institutionalization of P4 (although there are several articles that were foiled by NU) as well as a single principle policy. In addition to discussing the acceptance of Pancasila, the Situbondo Congress also stated that it was out of PPP (even practical politics) after experiencing several times of political marginalization and its culmination when feeling cheated in the DCS determination Naro.

Keywords : Politic, NU, PPP

PENDAHULUAN

Sebagai partai politik, Partai NU memiliki prestasi puncak ketika berlangsungnya pemilu 1971, yakni dengan memperoleh suara sebesar 18,7%. Meski harus berhadapan dengan Golkar dan delapan partai politik lainnya, Partai NU berhasil meraih kemenangan sekaligus menempati posisi kedua, naik satu tingkat dari pemilu 1955.¹ Salah satu faktor naiknya perolehan suara NU adalah berakarnya basis Nahdliyin (warga NU) di pedesaan dan gencarnya kampanye yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh muda NU seperti Subchan ZE, dkk. Namun setelah pemilu 1971, NU mulai menghadapi persoalan baru dengan pemerintah. Orde Baru memiliki kesimpulan bahwa sistem multi partai kurang menjamin terlaksananya pembangunan nasional. Konsekuensinya adalah perombakan tatanan politik harus segera dilakukan dengan cara melakukan pengelompokan partai.²

Pada tahun 1973, Pemerintah Orde Baru mulai merampingkan jumlah partai-partai peserta pemilu. Dari sepuluh partai yang ada disederhanakan menjadi dua partai politik. Partai yang berazas nasionalis dan Kristen seperti PNI, IPKI, Partai Murba, Parkindo, dan Partai Katolik dilebur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sedangkan partai-partai yang berazas Islam seperti Partai NU, Parmusi, Perti dan PSII dilebur ke dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Golongan karya (Golkar) tidak diakui sebagai partai politik, namun diizinkan menjadi salah satu kontestan pemilu.³ Setelah pengelompokan partai menemukan formatnya, maka dikeluarkanlah UU Nomor 3 tahun

1975 tentang partai politik dan Golongan Karya, yang menetapkan kehidupan politik di Indonesia hanya diikuti oleh dua partai politik, yaitu PPP, PDI dan satu Golkar.⁴

Setelah terjadi fusi partai politik pada tahun 1973, posisi NU dalam tubuh PPP mengalami beragam persoalan dan memasuki fase yang cukup sulit.⁵ Pada masa awal terjadinya fusi, posisi NU di PPP sebetulnya cukup strategis, namun peranan tokoh-tokoh NU lebih banyak menempati Majelis Syuro, sebuah jabatan bergengsi namun tidak memiliki pengaruh berarti terhadap kebijakan partai. Kemudian peristiwa lain yang menyebabkan renggangnya hubungan NU dengan PPP adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh ketua umum partai. Beberapa nama tokoh NU yang dianggap representatif justru disingkirkan dari pencalonan anggota DPR-RI, dan digantikan oleh calon yang bukan prioritas namun masih berasal dari kalangan NU. Kebijakan ini tentu berimbas pada konflik internal di kalangan NU sendiri.⁶

Selain kebijakan fusi partai oleh orde baru yang membawa dampak konflik internal di PPP, pemerintah juga pernah membuat kebijakan yang cukup kontroversial ketika benar-benar menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal dalam setiap organisasi, termasuk partai politik. Sebagai partai yang berasaskan Islam dan berlambang kakkah, PPP mengalami tekanan politik kekuasaan Orde Baru. Untuk kedua kalinya rezim orde baru melakukan restrukturasi politik, yaitu melalui penerapan UU No. 5 Tahun 1985. Undang-Undang ini mewajibkan semua organisasi masyarakat (ormas) dan partai politik untuk menerima Pancasila sebagai asas

¹ Choirul Anam. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU (Surabaya : Bisma Satu, 1999)*, hlm. 313

² Syamsuddin Haris. *PPP dan Politik Orde Baru. dalam Ibid.* hlm. 3

³ Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan. *Antologi NU : Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah (Surabaya : Khalista dan LTN NU Jawa Timur, 2007)*, hlm. 20

⁴ UU Nomor 3 tahun 1975 (Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Timur)

⁵ Robert F. Hefner. "Pengantar" dalam Andree Feillard, *NU Vis a Vis Negara, ter. Lesmana (Yogyakarta : LKiS, 1999)*, xviii

⁶ Choirul Anam. *Op. Cit.*, hlm. 356

tunggal. Situasi tersebut membuat PPP seakan-akan dipaksa untuk mengubah asas dan lambangnya.

Mulai saat itu PPP mengalami disorientasi ideologis, penyebabnya artikulasi politik Islam yang melambangkan identitas politik partai semakin kabur. Pada Muktamar I PPP tahun 1984, PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan perubahan lambang partai dari kakbah menjadi bintang dalam segi lima. Momen ini menjadikan PPP sebagai benteng terakhir kekuatan politik Islam yang mengubah asas Islam sebagai ideology partai dan menggantinya dengan Pancasila.⁷

Serangkaian polemik yang muncul di dalam tubuh PPP menimbulkan kesadaran untuk menyerukan gerakan kembali ke khittah 1926 melalui Munas Alim Ulama NU di Situbondo pada 1983. Konsekuensi logis khittah NU merupakan penegasan bahwa NU melepaskan keterlibatannya dari aktifitas politik praktis yang sebelumnya ditekuni secara intens. Hingga akhirnya pada tahun 1984, NU secara resmi menyatakan sikap keluar dari partai politik melalui Muktamar NU di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan utama yang dibahas adalah mengenai dinamika perjalanan politik NU sejak mulai bergabung dalam PPP tahun 1973 hingga keluarnya NU dari PPP tahun 1984. Dari permasalahan utama tersebut, kemudian dijabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah keterlibatan NU di dunia politik ?
2. Bagaimana pemerintah Orde Baru melakukan hegemoni terhadap Partai Persatuan Pembangunan dan Nahdlatul Ulama?

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan perjalanan politik NU tahun 1973-1984. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan tujuan positif bagi pengetahuan khususnya mengenai Perjalanan Politik Nahdlatul Ulama Tahun 1973-1984 dari yang bersifat umum sampai dengan yang bersifat khusus, antara lain seperti :

1. Menjelaskan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama
2. Menganalisis keterlibatan NU dalam aktivitas politik nasional.
3. Menganalisis hegemoni pemerintah Orde Baru terhadap NU dan PPP

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai sejarah yang telah terjadi pada masa lalu diperlukan suatu proses rekonstruksi kembali. Penelitian dalam permasalahan ini dilakukan berdasarkan disiplin ilmu sejarah yang telah ditetapkan, permasalahan tersebut dapat telusuri dengan menemukan sumber- sumber yang sesuai dengan tema penelitian penulis. Dalam sejarah ada empat tahapan yang digunakan sebagai metodologi penelitian. Tahapan tersebut secara berturut – turut adalah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.⁹

1. Penelusuran Sumber (Heuristik)

Tahap awal ini, penulis mencari sumber- sumber primer dan sekunder yang terkait dengan “Perjalanan Politik Nahdlatul Ulama Tahun 1973-1984”. Sumber primer merupakan sumber yang berkaitan langsung dari peristiwa dan kejadian yang terjadi, yaitu berupa dokumen putusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Situbondo 1983 dan laporan hasil Muktamar Situbondo Tahun 1984 yang diperoleh dari museum Nahdlatul Ulama.

Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang merujuk dari karya sejarah berupa buku atau artikel yang berdasarkan sumber primer. Sumber sekunder berupa buku dan jurnal seperti buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU karya Choirul Anam yang menjelaskan tentang sejarah kelahiran NU dan aktivitasnya di dunia politik pada masa awal. Kemudian didapatkan laporan wawancara dengan KH. Ali Maschan Moesa selaku mantan ketua PWNU Jawa Timur dan aktivis NU tahun 1980an, serta KH. Masykur Hasyim selaku mantan pengurus PPP baik ditingkat pusat maupun daerah. Sumber sekunder yang diperoleh penulis berupa buku, artikel, dan penelitian terdahulu berasal dari Perpustakaan Daerah Jawa Timur, Perpustakaan Pusat Universitas Negeri Surabaya, Perpustakaan Pusat UIN Sunan Ampel, dan Perpustakaan Pusat Universitas Airlangga Surabaya.

⁷ Masykur Hasyim, *Menusantarakan Politik Islam : Perjalanan Panjang Partai Persatuan Pembangunan*, (Surabaya: Yayasan Sembilan Lima, 2002), hlm. 64-65

⁸ MH. Rofiq. *Op. Cit.*, hlm. 4

⁹ Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya: Unesa University Press, 2005). hlm. 10-11

2. Kritik Sumber

Kritik sumber dalam penelitian Perjalanan Politik NU dilakukan dengan menguji sumber primer sebelumnya. Kritik sumber dibedakan menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik intern merupakan kritik yang digunakan dalam penelitian ini dan digunakan untuk menguji kevalidan isi atau kandungan sumber. Kritik tersebut bertujuan untuk menguji kredibilitas isi sumber dari sumber yang telah ditemukan untuk menjadikan tahap selanjutnya yaitu fakta.¹⁰

Tahap kritik sumber, penulis melakukan uji verifikasi fakta terhadap beberapa sumber baik sumber primer maupun sekunder yang diperoleh. Proses kritik sumber pada penelitian ini adalah menghubungkan antara isi pembahasan dalam buku satu dengan yang lain yang berhubungan dengan perpolitikan NU tahun 1973-1984. Kemudian peneliti melakukan wawancara sebagai pembandingan terhadap temuan dalam buku yang diperoleh. Sehingga, pada tahap ini penulis memperoleh fakta-fakta sejarah yang kredibel untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu interpretasi terhadap fakta dan temuan.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan penafsiran terhadap suatu fakta dengan menganalisis dari sumber dan fakta yang telah diperoleh.¹¹ Setelah melakukan kritik sumber penulis memasuki tahap selanjutnya yaitu interpretasi atau penafsiran terhadap suatu fakta. Pada tahap ini penulis melakukan analisa terhadap fakta-fakta yang diperoleh, kemudian dianalisis adanya keterkaitan antara fakta satu dengan fakta yang lain. Analisa yang dimunculkan oleh penulis adalah melalui putusan Muktamar ke-27 Situbondo dengan perjalanan politik NU dalam kurun waktu 1973-1984, dalam hal ini penulis menggunakan konsep teori hegemoni dan korporatisme negara dalam menganalisis peristiwa tersebut.

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi merupakan penulisan sejarah yang didapat dari fakta-fakta yang sudah diinterpretasi atau ditafsirkan yang kemudian disajikan secara tertulis sebagai suatu kisah atau cerita sejarah berupa bacaan ilmiah yang logis dan sistematis.¹² Pada tahap ini setelah berhasil menginterpretasi fakta-fakta yang berkaitan dengan tema, maka penulis merumuskan fakta-fakta tersebut sebagai hasil penelitian sejarah tentang **“Perjalanan Politik Nahdlatul Ulama Tahun 1973-1984”**

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. SEJARAH BERDIRINYA NU

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh ulama pondok pesantren tahun 1926 di Kota Surabaya. Pembentukan jam'iyah Nahdlatul Ulama merupakan suatu usaha pengorganisasian potensi dan peran ulama pesantren yang telah ada, untuk ditingkatkan dan dikembangkan lebih luas lagi. Dengan kata lain, didirikannya NU adalah untuk wadah bagi upaya mempersatukan dan menyatukan para ulama pondok pesantren dalam rangka tugas pengabdian yang tidak lagi terbatas pada soal kepesantrenan dan kegiatan ritual keagamaan semata, namun lebih ditingkatkan lagi pada kepekaan terhadap masalah-masalah sosial, ekonomi maupun persoalan kemasyarakatan pada umumnya.¹³

Untuk mengetahui lebih jauh latar belakang terbentuknya NU, perlu melihat gambaran berbagai peristiwa dan perkembangan yang mendorong kelahiran NU pada awal abad ke-20. Pembentukan NU seringkali dijelaskan sebagai reaksi defensif terhadap berbagai aktifitas kaum reformis dan kelompok modernis. Mereka bersikap kritis terhadap berbagai kepercayaan lokal dan berbagai praktiknya serta menentang otoritas ulama tradisional. Konflik-konflik tajam antara kaum reformis dan Islam tradisional memang menjadi salah satu peristiwa yang melatar belakangi berdirinya NU, namun perkembangan Internasionallah yang memberikan alasan langsung bagi berdirinya NU.¹⁴

B. Keterlibatan NU Dalam Aktivitas Politik Nasional

1. Keterlibatan NU dalam MIAI

Di awal berdirinya MIAI, beberapa perhimpunan Islam yang menyatakan diri bergabung menjadi anggota adalah Syarikat Islam, Muhammadiyah, al-Islam, Persatuan Ulama Majalengka, al-Irsyad Surabaya, Hidayatul Islamiyah Banyuwangi, dan al-Khoiriyah Surabaya. Pada saat itu NU belum masuk menjadi anggota, Kiai Haji Wahab Hasbullah

¹⁰ Aminuddin Kasdi. *Ibid*. hal: 28-29

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ Choirul Anam. *Op. Cit.*, hlm. 18

¹⁴ Martin van Bruinessen. *Op. Cit.*, hlm. 17-18

yang aktif dalam kongres pertama bukan sebagai perwakilan NU melainkan selaku pendiri dan penasihat MIAI.¹⁵

NU baru bergabung setelah merasa yakin bahwa kaum pembaru tidak mendominasi dalam penggabungan organisasi Islam ini, seperti yang pernah terjadi pada kongres-kongres al-Islam tahun 1920an. Selain itu, NU juga tidak ingin melihat MIAI berantakan ditengah jalan hanya karena perbedaan pandangan politik dan atau perbedaan mendasar soal aqidah. Bagi NU sendiri, keterlibatannya dalam MIAI merupakan langkah awal menuju dunia politik dalam arti terbawa untuk menentukan posisi secara tegas terhadap penjajahan Belanda menjelang Perang Dunia II.¹⁶

2. Keterlibatan NU dalam Masyumi

Dua bulan setelah proklamasi, pemerintah mengeluarkan Maklumat nomor X yang berisi tentang anjuran mendirikan partai-partai politik. Anjuran tersebut memberikan wadah terhadap segala aliran politik yang berkembang di masyarakat, tak terkecuali umat Islam. Melalui sebuah kongres pada tanggal 7-8 November 1945 di Yogyakarta, Masyumi mengubah dirinya menjadi sebuah partai politik yang berasaskan Islam. Adapun yang berdiri setelah kemerdekaan ini berbeda dengan Masyumi bentukan Jepang, sebab partai ini dibentuk dan didirikan oleh umat Islam sendiri tanpa campur tangan pihak asing dan tidak pula membantu pemerintahan pihak asing. Meskipun dalam pemakaian identitas tetap menggunakan nama yang sama.¹⁷

Pada saat itu persatuan dan kesatuan umat Islam dalam tubuh Masyumi nampak jelas terwujud. Hampir tidak ada perselisihan dan perbedaan pendapat yang cukup berarti, meskipun dalam pembagian kedudukan menjadi menteri maupun anggota-anggota parlemen ada porsi yang berbeda. Namun, keadaan yang kondusif seperti itu tidaklah berlangsung lama.¹⁸

Faktor yang membuat Masyumi cepat mengalami perpecahan adalah format pembentukan struktur keanggotaan yang mendua, yaitu terdiri dari anggota organisasi dan perorangan. Memang awalnya format seperti ini dianggap ideal sekali, sebab perwakilan dari anggota organisasi mampu membawa dukungan massa yang banyak, sedangkan anggota perorangan terdiri atas para intelektual, terutama yang berpendidikan barat dan cerdas pandai lainnya. Namun sikap para anggota perorangan yang merasa jumawa tidak mendapatkan simpati dari anggota lain. NU sebagai anggota istimewa menghendaki adanya perbandingan suara yang proporsional antara anggota perorangan dan anggota istimewa. Sebab menurut NU, amat tidak logis anggota perorangan memiliki jumlah suara yang sama dengan anggota istimewa yang memiliki banyak konstituen.

Puncak konflik NU dengan Masyumi terjadi pada saat pembahasan kursi menteri agama. Sebagian besar anggota DPP Masyumi menghendaki agar NU rela melepaskan jabatan tersebut, sebab NU sudah tiga kali berturut-turut memegang jabatan menteri agama. Sementara NU sendiri tetap menghendakinya, sebab dengan jalan itu eksistensi politik NU dapat tetap terjamin. Di pihak unsur lain, Muhammadiyah juga menghendaki jabatan itu lantaran NU sudah memimpin kementerian agama selama tiga kali kabinet, setidaknya jabatan menteri agama tidak dipegang NU terus menerus. Alasan inilah yang kemudian membawa NU mengambil keputusan keluar dari Masyumi.¹⁹

Pernyataan keluarnya NU dari Masyumi disampaikan secara resmi pada muktamar ke-19 di Palembang tahun 1952. Dengan demikian NU telah membuka lembaran sejarah baru khususnya dalam ranah politik. Jika semula NU hanya menitikberatkan orientasinya pada aspek sosial dan keagamaan, maka semenjak muktamar Palembang NU menambah orientasi gerakan pada masalah politik. Dalam AD-ART

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Andre Feillard. *Op. Cit.*, hlm. 17

¹⁷ MH Rofiq. *Op. Cit.*, hlm. 50

¹⁸ Abdul Basit Adnan. *Kemelut di NU*, (Solo : Mayasari, 1982)

pun sudah tidak bernama *Jam'iyah* lagi, namun sudah diubah menjadi AD-ART Partai Politik NU.²⁰

3. NU menjadi partai politik

Setelah NU resmi menjadi partai politik, para anggota NU yang duduk di Parlemen RI segera mengadakan konsolidasi politik. Delapan anggota fraksi Masyumi (dari NU) secara sukarela membentuk fraksi sendiri, yang diberi nama fraksi NU. Di antaranya yaitu, KH Wahab Hasbullah, KH Muhammad Ilyas, M Saleh Suryaningprojo, M Ali Prataningkusumo, A. A. Achsin, Idham Chalid, As. Bamid dan Zainul Arifin (kemudian diganti oleh Saifudin Zuhri).²¹

Perjalanan politik NU di masa pertumbuhannya tampak semakin mantap. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil yang lebih besar lagi, partai politik baru ini kemudian melakukan pemantapan untuk menghadapi pemilu. Ada tanggal 8-13 September 1954, Partai NU mengadakan Mukhtar yang ke-20 di Kota Surabaya. Mukhtar ini adalah yang pertama kali diselenggarakan semenjak NU berubah menjadi partai politik. Secara tidak langsung, Mukhtar ini juga sebagai ajang menyusun strategi guna menghadapi pemilu yang akan datang. Sebab pemilu yang berlangsung pada 29 September 1955 untuk anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante, merupakan momentum yang amat penting guna mengukur kekuatan NU.²²

Usaha keras yang dilakukan para pemimpin NU tidaklah sia-sia. Hasil pemilu 1955 menunjukkan bahwa NU berhasil keluar sebagai kontestan empat besar, dibawah PNI dan Masyumi. NU berhasil memperoleh total suara sebanyak 6.955.141 suara, dengan perolehan suara sebanyak itu membuat NU mendapatkan tambahan kursi di Parlemen. Dari yang semula

mendapatkan 8 kursi saat masih bergabung dengan Masyumi, kini melonjak menjadi 45 kursi.²³

Keberhasilan NU menempati urutan tiga besar ini mengejutkan banyak pihak, terutama kalangan Masyumi, bahkan di kalangan NU sendiri tidak percaya akan keberhasilan yang dicapainya. Prestasi dalam politik seperti itu tidak akan pernah terjadi, jika NU tidak *mufaraqah* dan masih tetap berada dalam Partai Masyumi. Dan keberhasilan tersebut juga menjadi pembuktian besarnya basis massa yang dimiliki oleh NU, sebuah kekuatan yang seringkali dipertanyakan saat masih berada di Masyumi.²⁴

C. Perkembangan Politik NU Pada Masa Orde Baru

Pada tahun 1952 NU pernah menyatakan sikap keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik, akibat perselisihannya dengan kaum modernis. Namun pada tahun 1973, pemerintah menerapkan sistem kepartaian hegemonik (*Hegemonic Party System*) dengan menyederhanakan jumlah partai politik dari sembilan menjadi dua partai plus Golkar.

Kebijakan korporatisme negara yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dirasakan oleh NU seperti ketika bergabung dalam tubuh Masyumi. Hal yang dikhawatirkan adalah konflik antar unsur pendukung partai yang akan terjadi kembali. Segala macam penolakan yang dilakukan oleh NU dan PSII tidak berhasil untuk menggagalkan kebijakan fusi tersebut. Polemik internal yang dikhawatirkan pun tidak lama muncul. Konflik pertama diawali ketika pembentukan struktur pengurus yang dinilai tidak merata oleh pihak NU, sebab basis masa NU adalah yang paling banyak dibandingkan dengan unsur-unsur lain. Namun jabatan ketua umum justru diberikan kepada wakil dari Parmusi, perwakilan NU mendapatkan kedudukan sebagai Presiden Partai yang sebenarnya tidak memiliki otoritas penuh terhadap kebijakan partai.

²⁰ PB Nahdlatul Ulama. *Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Partai NU*, 1960

²¹ Saifuddin Zuhri. *Kaleidoskop Politik III*. (Jakarta : Gunung Agung, 1981), hlm. 642

²² Ahmad Mansur Surya Negara. *Gerak Langkah Jam'iyah dan Partai Politik NU : 1926-1955*, *Panji Masyarakat*, No. 337, tahun XXIII, 1 Oktober 1981, hlm. 156-157

²³ C. S. T. Kansil. *Inti Pengetahuan Umum*, (Jakarta : Pradaya Paramita, 1974), hlm. 73

²⁴ Choirul Anam. *Op. Cit.*, hlm. 272

Konflik antar unsur yang semula dikhawatirkan pada akhirnya terjadi jua antara unsur Parmusi/MI dan NU. Dapat dikatakan bahwa perselisihan antar dua unsur tersebut merupakan yang paling sering terjadi dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain, sebab MI yang dinilai mempunyai basis masa lebih sedikit dibanding NU ternyata memiliki kedekatan dengan pemerintah, sehingga dalam banyak persoalan MI selalu unggul.

Tantangan yang dihadapi NU tidak hanya datang dari internal, ketika berlangsungnya pembahasan RUU di parlemen, tidak jarang pihak NU terlibat konfrontasi dengan pemerintah (eksternal). Hal tersebut dapat dilihat pada saat pembahasan RUU Perkawinan, RUU Parpol dan Golkar, RUU Pemilu, SU MPR tentang aliran kepercayaan serta pelembagaan P4. Hampir semua sidang pembahasan diwarnai aksi penolakan dari pihak NU, penolakan yang paling parah adalah ketika SU MPR yang menyinggung tentang aliran kepercayaan dan pelembagaan P4, perwakilan NU diparlemen melakukan aksi *walk-out* yang dipimpin oleh Kiai Bisri Syansuri. Tidak berhenti di situ saja, tindak *walk-out* atau tidak menghadiri rapat juga dilakukan kembali saat pembahasan RUU Pemilu.

Tindakan tersebut tentu membuat presiden geram, sehingga dalam pidato yang disampaikan berisi tentang serangan kepada pihak-pihak yang diindikasikan membangkang terhadap pemerintah. Dalam pidato di tahun-tahun berikutnya, presiden sering menyampaikan tentang penerapan Pancasila sebagai asas tunggal, dan mengesampingkan ideologi yang lain. Akibat diterapkannya asas tunggal Pancasila tersebut membuat PPP mengganti asas dan logo partainya, sehingga mengalami disorientasi ideologi.

Pada awalnya NU sendiri juga menolak, namun setelah adanya pendekatan dari pemerintah pada akhirnya menerima juga. Pernyataan tersebut dibahas dalam Munas Alim Ulama dan dikukuhkan dalam Mukhtamar ke 27 di Situbondo, dalam Mukhtamar tersebut selain menyatakan menerima Pancasila sebagai asas tunggal, NU juga dengan tegas menyatakan keluar dari PPP maupun politik praktis, puncak dari kekecewaan NU adalah ketika merasa

dicurangi dalam penetapan DCT yang dikeluarkan oleh J. Naro. Keluarnya NU dari PPP merupakan akumulasi kekecewaan setelah bertahun-tahun merasa termarjinalkan dalam urusan politik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi atau perkumpulan para ulama yang memiliki persamaan kultur dalam menjalankan syariat Islam. Pada awal mula berdirinya NU lebih berorientasi pada aspek keagamaan, sosial dan pendidikan. Namun seiring berjalannya waktu, orientasi NU perlahan-lahan mulai berubah haluan ke arah politik praktis, hal itu dimulai ketika NU bergabung dalam MIAI yang kemudian bertransformasi menjadi Masyumi. Bahkan NU sempat menjadi partai politik sendiri yang ditegaskan melalui Mukhtamar ke-19 di Palembang.

Perjalanan NU menjadi partai politik ternyata membawa hasil yang diluar dugaan sebab menjadi pemenang ketiga setelah PNI dan Masyumi, dan puncaknya adalah ketika Pemilu 1971 dimana NU meraih posisi ke dua setelah Golkar. Perubahan situasi politik membuat NU terpaksa harus bergabung dengan PPP, secara otomatis eksistensi politik NU terenggut oleh PPP.

Pada masa ini posisi NU semakin sulit, beberapa kali NU merasa termarginalisasi dalam konteks politik. Misalnya ketika sidang di Parlemen, pendapat NU seringkali tidak didengarkan oleh pemerintah, berbagai penolakan atas hasil sidang juga dilakukan oleh tokoh-tokoh politisi NU, puncaknya ketika terjadi aksi *walk-out* dalam pembahasan GBHN pada SU MPR.

Kekesalan NU dalam politik tidak terbendung lagi ketika merasa didzolimi saat penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR RI yang diusulkan oleh John Naro. Banyak tokoh-tokoh NU yang dianggap vokal dan populer digusur dan digantikan oleh calon yang kurang kompeten. Melihat situasi politik yang demikian rumit, akhirnya melalui Mukhtamar ke-27 di Situbondo, NU dengan tegas menyatakan sikap keluar dari Politik Praktis (secara otomatis juga keluar dari Partai Persatuan Pembangunan) serta kembali pada khittah 1926.

B. Saran

Penelitian ini mengambil tema hegemoni dan korporasi pemerintah sejak 1973-1984, dimana periode tersebut terdapat begitu banyak konflik yang mendera NU baik dari internal maupun eksternal. Peneliti menganggap perjuangan NU untuk keluar dari kemelut tersebut sangat menarik dan unik, oleh karena itu perlu dilakukan upaya lain yang lebih serius terkait tema/pemikiran yang sama.

Konflik internal NU sebelum diselenggarakannya Munas dapat menjadi pembahasan yang panjang lebar, namun dalam penelitian ini tidak begitu banyak yang ditulis, sebab jika terlalu intens akan mengu-rangi fokus pembahasan sesuai dengan tema awal. Jadi hal tersebut patut untuk dilakukan penelitian lebih lanjut guna menemukan benang merah dalam konflik internal yang melibatkan ulama dan politisi NU.

DAFTAR PUSTAKA**Arsip**

- PB Nahdlatul Ulama. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Partai NU, 1960
UU Nomor 3 tahun 1975 (Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Timur)

Buku

- Adnan, Abdul Basit. 1982. *Kemelut di NU*. Solo : Mayasari
Anam, Choirul. 1999. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Surabaya : Bisma Satu
Fadeli, Soeleiman dan Mohammad Subhan. 2007. *Antologi NU : Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*. Surabaya : Khalista dan LTN NU Jawa Timur
Feillard, Andree. 1999. *NU Vis a Vis Negara*. Terjemahan oleh Lesmana. Yogyakarta : LKiS
Hasyim, Masykur. 2002. *Menusantarakan Politik Islam : Perjalanan Panjang Partai Persatuan Pembangunan*. Surabaya : Yayasan Sembilan Lima
Kansil, C. S. T.. 1974. *Inti Pengetahuan Umum*. Jakarta : Pradaya Paramita
Kasdi, Aminuddin. 2008. *Memahami Sejarah*. Surabaya : Unesa University Press.

- Rofiq, MH. 2003. *NU dan Ambisi Kekuasaan*. Surabaya : LKP PW. GP. Ansor Jawa Timur
Van Bruinessen, Martin. 1994. *NU : Tradisi., Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta : LKiS.
Zuhri, Saifuddin. 1981. *Kaleidoskop Politik III*. Jakarta : Gunung Agung

Majalah

- Ahmad Mansur Surya Negara. Gerak Langkah Jam'iyah dan Partai Politik NU : 1926-1955, Panji Masyarakat, No. 337, tahun XXIII, 1 Oktober 1981